

**ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN PADA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2018-2023**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**ALISYA JODETRI**

**2022/22133007**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
DEPARTEMEN AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2025**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

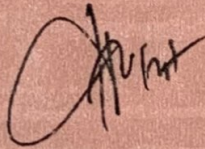
**ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN PADA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2018-2023**

Nama : Alisya Jodetri  
NIM : 22133007  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Vokasi

Padang, 24 Juli 2025

Diketahui Oleh :

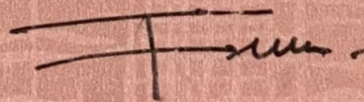
Koordinator Program Studi  
Diploma Tiga (DIII) Akuntansi



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc.  
NIP. 198401132009122005

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Fefri Indra Arza, SE, M. Sc, Ak.  
NIP. 197302131999031003



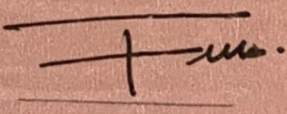
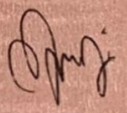
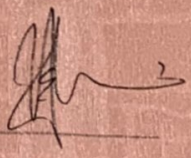
## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018-2023

Nama : Alisia Jodetri  
NIM / TM : 22133007 / 2022  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma Tiga (DIII) Akuntansi  
Sekolah Vokasi  
Universitas Negeri Padang*

Padang, 19 Agustus 2025

| Nama                                | Tim Penguji | Tanda Tangan                                                                          |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Feftri Indra Arza, SE., M.Sc, Ak | (Ketua)     |  |
| 2. Nurzi Sebrina, SE., M.Sc, Ak     | (Anggota)   |  |
| 3. Herlina Helmy, SE., M.SA, Ak     | (Anggota)   |  |



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alisya Jodetri  
NIM/TM : 22133007/2022  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 28 Desember 2003  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Jln. Adinegoro No.12 Lubuk Buaya  
Judul Tugas Akhir : “Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2023”

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2025

Yang Menyatakan



Alisya Jodetri

NIM. 22133007

## ABSTRAK

**Judul Tugas Akhir : Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan  
Realisasi Anggaran Pada Perwakilan Badan  
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan  
(BPKP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-  
2023**

**Dosen Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE., M. Sc., Ak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis varians belanja, pertumbuhan belanja, belanja modal terhadap total belanja, belanja pegawai terhadap total belanja, efisiensi belanja dan efektivitas belanja pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat dan data diperoleh dari Website Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan 1) analisis varians belanja pada tahun 2018-2023 memiliki kriteria *Favourable Variance*, 2) analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2018-2023 pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 17% dan pertumbuhan terendah terjadi pada masa COVID-19 pada tahun 2020-2021 yaitu sebesar (4%), 3) analisis belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2018-2023 masih tergolong rendah dengan rata-rata sebesar 2,46%, 4) analisis belanja pegawai terhadap total belanja pada tahun 2018-2023 mendominasi struktur belanja dengan rata-rata sebesar 70,75% dari total belanja, 5) rasio efisiensi belanja pada tahun 2018-2023 dikategorikan kurang efisien, 6) rasio efektivitas belanja pada tahun 2018-2023 dikategorikan efektif.

Kata Kunci : Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja Belanja, Belanja, Varians, Pertumbuhan, Efektivitas, Efisiensi, Belanja Modal, Belanja Pegawai.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023”** dengan baik serta shalawat dan salam kepada Nabi Yuna Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh penjuru dunia. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelah Ahli Madya dari Program Studi Diploma III Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu kepada :

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan serta kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Teristimewa kepada orang tua tercinta, Ayahanda Syafrizal dan Ibunda Erawati serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk moral juga materil dan selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Bambang Heriyadi, M.T selaku Wakil Direktur 1 Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Nelvirita, S.E., M,Si, Ak. selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc. selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M. Sc, Ak. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan waktu yang telah ditentukan.
7. Ibu Dewi Pebriyani, S. E., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Diploma III Akuntansi dan program studi lainnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah berbagi ilmu dan membimbing penulis selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Bidang PPID di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam pengambilan data selama penelitian.
10. Terimakasih untuk sahabat tersayang Alifya Keisha Zahra, Faura Hidayatul Ikhfadilla dan Gusti Rani teman seperjuangan Tugas Akhir yang telah memberikan semangat, bantuan dan selalu setia dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Kepada adik tersayang Kencana, terimakasih atas dukungan secara moril maupun matrial dan selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

12. Semua teman-teman seperjuangan khusus Diploma III Akuntansi 2022 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penyusunan Tugas Akhir ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan yang bersifat membangun atas Tugas Akhir ini.

Akhir kalimat dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kita bersama.

Padang, 24 Juli 2025

Alisya Jodetri



## DAFTAR ISI

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....</b>                          | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>                           | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                                | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                         | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                    | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                 | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                               | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 7           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                    | 8           |
| D. Manfaat Penelitian .....                                  | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                          | <b>10</b>   |
| A. Kinerja Keuangan.....                                     | 10          |
| B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....                     | 12          |
| 1) Definisi Laporan Realisasi Anggaran .....                 | 12          |
| 2) Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran .....       | 12          |
| 3) Kandungan Informasi Umum Laporan Realisasi Anggaran ..... | 13          |
| 4) Isi Laporan Realisasi Anggaran .....                      | 13          |
| C. Belanja Negara .....                                      | 16          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                   | <b>25</b>   |
| A. Jenis Penelitian.....                                     | 25          |
| B. Tempat dan Objek Penelitian .....                         | 25          |
| C. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....            | 26          |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                               | 28          |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                             | 28          |
| F. Teknik Analisis Data .....                                | 28          |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>          | <b>30</b>   |

|                                         |                                                                  |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| A.                                      | Gambaran Objek Penelitian .....                                  | 30        |
| 1)                                      | Sejarah Singkat Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.....     | 30        |
| 2)                                      | Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat .....               | 31        |
| 3)                                      | Misi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat .....               | 32        |
| 4)                                      | Motto Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat .....              | 32        |
| 5)                                      | Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat..... | 32        |
| B.                                      | Hasil Penelitian dan Pembahasan.....                             | 33        |
| 1)                                      | Analisis Varians Belanja .....                                   | 33        |
| 2)                                      | Analisis Pertumbuhan Belanja .....                               | 36        |
| 3)                                      | Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja.....               | 39        |
| 4)                                      | Analisis Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja.....             | 42        |
| 5)                                      | Rasio Efisiensi Belanja .....                                    | 46        |
| 6)                                      | Rasio Efektivitas Belanja .....                                  | 48        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> |                                                                  | <b>51</b> |
| A.                                      | Kesimpulan .....                                                 | 51        |
| B.                                      | Saran.....                                                       | 53        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>              |                                                                  | <b>54</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                    |                                                                  | <b>58</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.                                               | 6  |
| Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....                                                                    | 26 |
| Tabel 3. Analisis Varians Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 .....                            | 33 |
| Tabel 4. Analisis Pertumbuhan Realisasi Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 .....              | 37 |
| Tabel 5. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 .....       | 40 |
| Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 .....   | 40 |
| Tabel 7. Analisis Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat .....                | 42 |
| Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 ..... | 44 |
| Tabel 9. Rasio Efisiensi Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023.....                              | 46 |
| Tabel 10. Rasio Efektivitas Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 .....                          | 49 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.....              | 31 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat..... | 32 |
| Gambar 3. Grafik Analisis Varians Belanja .....                            | 36 |
| Gambar 4. Grafik Analisis Pertumbuhan Belanja .....                        | 39 |
| Gambar 5. Grafik Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja.....        | 42 |
| Gambar 6. Grafik Analisis Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja.....      | 45 |
| Gambar 7. Grafik Rasio Efisiensi Belanja .....                             | 48 |
| Gambar 8. Grafik Rasio Efektivitas Belanja.....                            | 50 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 2018 .....    | 59 |
| Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 2019 .....    | 60 |
| Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 2020 .....    | 61 |
| Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 2021 .....    | 62 |
| Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 2022 .....    | 63 |
| Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 2023 .....    | 64 |
| Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari Prodi Diploma III Akuntansi .....                     | 65 |
| Lampiran 8. Balasan Surat Izin Penelitian dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat ..... | 66 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era reformasi di berbagai sektor, terutama dalam pemerintahan, kinerja pemerintah negara didorong untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan membuat pemerintah perlu melakukan perubahan dalam struktur lembaga publik di Indonesia. Pemerintah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta merumuskan kebijakan publik yang selaras dengan tujuan utama, yaitu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan orientasi pada pelayanan (Mardiasmo, 2009). Reformasi ini tidak hanya mencakup aspek birokrasi, tetapi juga penataan kembali sistem anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu instrumen utama dalam pencapaian tujuan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN memiliki tujuan utama untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagai pedoman untuk penerimaan dan pengeluaran negara, APBN bertujuan untuk meningkatkan produksi,

menciptakan lapangan kerja, dan memajukan perekonomian. Dengan demikian, anggaran menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintah, mengarahkan semua aktivitas ke arah yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, proses pengeluaran harus dilakukan secara terkendali, sehingga mekanisme pengeluaran perlu dirancang seefisien dan seefektif mungkin. Auditor pemerintah sangat memperhatikan audit pengeluaran, mengingat banyak kebocoran APBN terjadi pada fase ini akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta kurangnya pemahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja (Syamsuddin et al., 2022). Pengukuran kinerja penting untuk membantu pengambil keputusan dalam memantau dan meningkatkan kinerja, serta menilai akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pengalokasian anggaran umumnya mencakup periode satu tahun dan menyatakan perkiraan pendapatan serta beban yang direncanakan untuk periode tersebut. Pola penyusunan anggaran harus berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), diharapkan program kerja dan anggaran tidak hanya berorientasi jangka pendek satu tahun, tetapi juga mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah secara berkelanjutan (Mahsun et al., 2011).

Melalui anggaran, manajemen dapat menilai efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai. Dalam upaya mempertanggungjawabkan kepada publik, pemerintah perlu mengoptimalkan anggaran untuk



meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua aspek harus dirancang dengan fokus pada pencapaian kinerja yang baik secara ekonomi, efisien, dan efektif (*value of money*). Menurut Mahmudi (2019) untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah, tidak bisa langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja di pemerintah berbeda dengan penilaian kinerja di perusahaan atau entitas lain yang berorientasi pada *profit*.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Mahsun et al., 2011). Proses ini dimulai dengan penetapan indikator kinerja yang menyediakan informasi yang memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memantau kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* bagi masyarakat. Pengukuran kinerja berfungsi untuk membantu pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja, dan menjaga fokus pada tujuan organisasi guna memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 Pasal 1 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga pengawas internal pemerintah yang memiliki peran

penting dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BPKP berperan sebagai pengawas internal yang memberikan rekomendasi dan laporan kepada pemerintah mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, mencakup segala aspek keuangan pemerintah pusat. Dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang telah diperbarui, BPKP memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Belanja yang dilakukan oleh BPKP untuk mendukung tugas pengawasan ini juga berasal dari APBN, menunjukkan hubungan yang erat antara lembaga tersebut dengan pengelolaan keuangan negara.

Dengan alat ukur berupa analisis yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran belanja. Untuk mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang disajikan akan terlihat sejauh mana keefektifan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas instansi selama satu tahun anggaran tersebut. Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan analisis varians belanja.

Untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat seberapa besar pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi. Misalnya dengan melihat pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya dapat menggunakan analisis pertumbuhan belanja. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan analisis keserasian belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Salah satunya adalah dengan rasio belanja modal terhadap total belanja serta menilai rasio belanja pegawai terhadap total belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang menggambarkan bagaimana suatu instansi memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan Rasio efisiensi dan efektivitas belanja. Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja yang digunakan oleh instansi.

Penelitian ini berfokus dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018-2023. Pemilihan tahun

2018 sebagai awal analisis sangat relevan, mengingat tahun tersebut menjadi titik awal sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan dan anggaran, sehingga penting untuk menganalisis kinerja belanja dalam konteks ini. Berikut disajikan data Belanja yang diambil berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 :

**Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Belanja</b> | <b>Anggaran Belanja</b> | <b>Persentase Realisasi Terhadap Anggaran</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>2018</b>  | Rp 24.481.181.141        | Rp 24.894.143.000       | 98,34%                                        |
| <b>2019</b>  | Rp 27.457.969.565        | Rp 28.130.187.000       | 97,61%                                        |
| <b>2020</b>  | Rp 26.335.983.774        | Rp 27.456.305.000       | 95,92%                                        |
| <b>2021</b>  | Rp 25.161.906.825        | Rp 25.300.248.000       | 99,45%                                        |
| <b>2022</b>  | Rp 28.146.495.170        | Rp 28.684.442.000       | 98,12%                                        |
| <b>2023</b>  | Rp 30.040.673.714        | Rp 30.350.569.000       | 98,98%                                        |

*Sumber : LRA Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023*

Berdasarkan Tabel 1, data Laporan Realisasi Anggaran belanja yang diperoleh dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sampai 2023, terlihat bahwa realisasi belanja setiap tahunnya mendekati jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Persentase realisasi terhadap anggaran tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebesar 99,45% capaian tersebut terjadi di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, di mana banyak instansi pemerintah menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan program dan kegiatan akibat pembatasan sosial, penyesuaian anggaran nasional, dan gangguan operasional lainnya. Sedangkan persentase terendah terdapat pada

tahun 2020 yang merupakan awal dari pandemi, persentase realisasi anggaran mengalami penurunan sebesar 95,92%.

Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak COVID-19 terhadap realisasi anggaran belanja. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap analisis anggaran dan realisasi belanja dengan judul **“Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka pokok permasalahan penelitian Tugas Akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja belanja diukur dengan analisis varians belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023?
2. Bagaimana kinerja belanja diukur dengan analisis pertumbuhan belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023?
3. Bagaimana kinerja belanja diukur dengan analisis belanja modal terhadap total belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023?
4. Bagaimana kinerja belanja diukur dengan analisis belanja pegawai terhadap total belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023?
5. Bagaimana kinerja belanja diukur dengan rasio efisiensi belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023?



6. Bagaimana kinerja belanja diukur dengan rasio efektivitas belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kinerja belanja yang diukur dengan analisis varians belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui kinerja belanja yang diukur dengan analisis pertumbuhan belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023.
3. Untuk mengetahui kinerja belanja yang diukur dengan analisis belanja modal terhadap total belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023.
4. Untuk mengetahui kinerja belanja yang diukur dengan analisis belanja pegawai terhadap total belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023.
5. Untuk mengetahui kinerja belanja yang diukur dengan rasio efisiensi belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023.
6. Untuk mengetahui kinerja belanja yang diukur dengan rasio efektivitas belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi penambah ilmu dan memperluas wawasan penulis mengenai analisis kinerja belanja yang ada pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik tentang keuangan daerah dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam melakukan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan referensi dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada pembaca.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selama 6 tahun, yaitu 2018 sampai dengan 2023 dengan analisis varians belanja dikategorikan kedalam *Favourable variance* karena rata-rata varians belanjanya bernilai positif atau disebut dengan selisih disukai artinya realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanjanya.
2. Kinerja keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selama 6 tahun, yaitu 2018 sampai dengan 2023 dengan analisis pertumbuhan belanja mengalami fluktuatif yaitu dimana anggaran yang ditetapkan dan realisasi yang diperoleh mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada masa sebelum pandemi (2018-2019) pertumbuhan belanja menunjukkan tren positif. Selama masa pandemi COVID-19 (2020-2021) terjadi kontraksi belanja yang ditandai dengan pertumbuhan negatif sebagai dampak dari *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi. Kemudian, pada masa pascapandemi (2022-2023) belanja kembali menunjukkan pertumbuhan positif.

3. Belanja modal terhadap total belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dengan rata-rata sebesar 2,46%.
4. Belanja pegawai terhadap total belanja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mendominasi struktur belanja dengan rata-rata selama 6 tahun yaitu 70,75% dari total belanja. Dominasi ini menunjukkan alokasi anggaran yang tinggi untuk kewajiban kepegawaian. Meskipun sempat terjadi peningkatan selama pandemi, proporsinya tetap tinggi hingga pascapandemi. Kinerja keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selama 6 tahun, yaitu 2018 sampai dengan 2023 dengan rasio efisiensi belanja dikategorikan kurang efisien dengan rata-rata sebesar 95,62%. Meskipun tergolong kurang efisien, kondisi ini masih menunjukkan pengendalian anggaran yang relatif stabil, karena realisasi belanja tidak jauh berbeda dari anggaran yang telah ditetapkan.
5. Kinerja keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selama 6 tahun, yaitu 2018 sampai dengan 2023 dengan rasio efektivitas belanja dikategorikan efektif, meskipun belum mencapai 100%, tetapi hal ini sudah mencerminkan bahwa alokasi anggaran telah digunakan secara optimal dalam mendukung fungsi pengawasan dan kontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan terhadap kinerja belanja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 hingga 2023, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan pengelolaan anggaran ke depannya, yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan agar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja modal guna memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara lebih maksimal.
2. Diharapkan diadakan evaluasi mengenai program-program yang tidak berjalan dengan baik, dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan ada perbaikan yang dilakukan untuk mencapai kriteria efisien dari segi pelaksanaan anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperpanjang masa waktu penelitian dan menggunakan rasio serta variabel yang lebih banyak, serta ruang lingkup yang lebih luas lagi agar mampu menunjukkan keadaan keuangan instansi yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Purnamawati, I. G., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Manajemen Keuangan: Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis/Ni Luh Gede Erni Sulindawati.
- Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA). *Media Bina Ilmiah*, 17(1), 93-100.
- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik.
- Fahmi, Irham. (2020). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Jarkasih, M., Ruliana, T., & Rachmawati, I. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 11(1), 282-290.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas*.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2019. *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.



- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2011). Akuntansi sektor publik. *Yogyakarta: BPFE*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Africano, F., & Loressa, M. (2021). Efisiensi dan efektivitas belanja langsung pada balai bahasa provinsi sumatera selatan. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 180-189.
- Mulyawan, W. (2020). Apbn Dan Pendapatan Nasional. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 1(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Presiden Nomor 192 Pasal 2 dan 3 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023.
- Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015–2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 1-10.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rina, E. S. I. N. L., & Haryadi, M. (2020). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 9(2), 271-281.

Riska. (2020). *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sadat, A. (2022). Tata Kelola Keuangan Pemerintahan.

Sharon, Ariel Sumenge. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013*. ISSN 2303-1174. Hal. 74-81. Diakses tanggal 04 Maret 2018.

Shofwah, A. L. R. N., & Handayani, N. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(7).

Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1).

Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuanlitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 170-177.
- Tantri, S. N., & Irmawati, P. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2016. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 27-37.
- Tatik, T., & Rizaldi, M. R. (2020). Analisis Rasio Keuangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.